

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal dan Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Biro Keuangan Kejaksaan Agung, 2014, *Laporan Tahunan (auded)*, Puslitbang Kejaksaan Agung, Jakarta
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Hadikusuma, Himan, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja dan Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1994, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Rineka Cipta, Bandung
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara, 2011, *Aktualisasi Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara*, Kejaksaan Agung, Jakarta
- , 2015, *Laporan Tahunan*, Kejaksaan Agung, Jakarta.
- , 2016, *Laporan Tahunan*, Kejaksaan Agung, Jakarta.
- Kejaksaan Agung, 2015, *Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN XXII)*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta
- Kholis, E. L., 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Solusi Publishing, Jakarta.
- Marbun, BN, 2004, *Kamus Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, J,akarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,"* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Soekanto , Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 1995, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 2002, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Hukum Pidana*, Alumni Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat Lembar Negara Tahun 1960 Nomor 1 ; LTN No. 1921

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Tahun 1971, Nomor 19 ; TLN. No. 2958

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang perubahan atas Undang Undang No 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Tahun 1999, Nomor 04 ; TLN. No. 3874

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Tahun 2001, Nomor 134 ; TLN. No. 4150

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembar Negara Tahun 2003, Nomor 47; TLN. No. 4286

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembar Negara Tahun 2004, Nomor 5 ; TLN. No. 4355

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembar Negara Tahun 2004, Nomor 67 ; TLN. No. 4401

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Lembar Negara Tahun 2011, Nomor 82, TLN. No. 5234

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 31, LTN. No. 4488

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1988 Tentang Eksekusi Uang Pengganti Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: B-012/A/Cu.2/01/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Pedoman Penyelesaian dan Kebijakan Akuntansi atas Piutang Negara Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-185/F/Fu.1/01/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyelesaian Uang Pengganti.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-006/A/JA/3/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-009/A/JA/01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1535/F/Fu.1/05/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Administrasi Pencarian dan Penyitaan Harta Benda Milik Terpidana untuk Menutupi Uang Pengganti.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-020/A/JA/7/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971

Keputusan Jaksa Agung Nomor : 157/A/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Surat

Surat Jaksa Agung RI Nomor B-012/A/Cu.2/01/2013 tanggal 18 Januari 2013 Pedoman permohonan penghapusan uang pengganti.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1535/F/Fu.1/05/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Administrasi Pencarian dan Penyitaan Harta Benda Milik Terpidana untuk Menutupi Uang Pengganti

Surat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Nomor : B-119/G/Gpk.3/7/2001 tanggal 31 Juli 2001 mengenai tindak lanjut pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Ananda Sitepu, Rozhi, 2012, “Peranan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Skripsi*, Fakultas Hukum Sumatera Utara, Medan
- Ismiansyah, Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Demokrasi*, Vol. 7 No.2, 2007
- Khilman, Iman, 2016, “*Peran Pusat Pemulihan Aset Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, Yogyakarta
- Madusira, M. A, 2011, *Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta. Yogyakarta.
- Marsinta, Sri et al., “Optimalisasi Penyelesaian Tunggakan Yang Berdasarkan Undang Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Bina Adhyaksa*, Vol. 7, No. 1, Nopember, 2016.
- Riyono, 2003, “Peran Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Tanah Negara Yang dikuasai Pihak Ketiga Di Daerah Jawa Barat”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Tas, F, 2001, “Optimalisasi Peran Dan Tanggung Jawab”, *Tesis*, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Yogyakarta.

Internet

- Chaniago, Hansen, 2012, “Bentuk - Bentuk Pidana Serta Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi”, <http://catatanhansenchaniago.blogspot.co.id/2012/05/bentuk-bentuk-pidana-serta-sistem.html>, Selasa, 08 Agustus 2017
- Fasabeni, Muhammad, Menagih Janji Kejagung Eksekusi Tunggakan Uang Pengganti Korupsi, www.gresnews.com/berita/hukum/1401611-menagih-janji-kejagung-eksekusi-tunggakan-uang-pengganti-korupsi, terakhir di akses tanggal 06 April 2016
- Irawan, D, 2015, “Soal Tunggakan Uang Pengganti Rp 13 T, Jaksa Agung: Segera Kita Selesaikan,” <https://news.detik.com/berita/d-2922486/soal-tunggakan-uang-pengganti-rp-13-t-jaksa-agung-segera-kita-selesaikan>, diaksek pada tanggal 11 April 2016